

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spritual (Waluyo dan Wirawan Ilyas, 2002). Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan nasional adalah melalui pembangunan ekonomi daerah.

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain (Aldo Adam, 2013).

Diberlakukannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001 merupakan implementasi dari pembangunan ekonomi daerah. Setiap daerah yang termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.

Keuntungan yang terjadi jika diberlakukan otonomi daerah antara lain pemerintah daerah akan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakatnya sendiri. Proses politik dalam masyarakat yang lebih sempit akan lebih cepat dan efisien daripada dalam masyarakat yang luas. Dalam pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakatnya akan lebih sedikit kekurangan atau kesalahan yang akan dibuat dalam mekanisme pengambilan keputusan (Suparmoko, 2002). Konsekuensi lain dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri (Vidya, 2013).

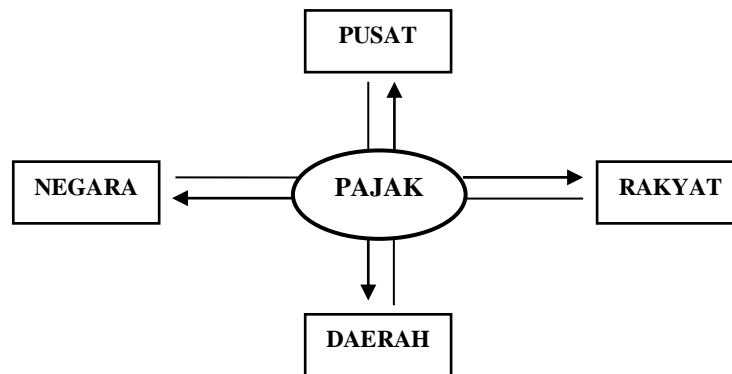
Dengan adanya otonomi, akan lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi yang dapat dilakukan. Keberhasilan dan kegagalan inovasi yang dilakukan di daerah tertentu akan mengakibatkan keinginan daerah lain mencoba agar mendapatkan keberhasilan di daerahnya masing-masing. Birokrasi yang sukar dan administrasi yang tidak efisien serta masalah pembiayaan dalam pembangunan daerah menjadi fokus utama.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Mengacu pada sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (Marihhot Pahala Siahaan, 2010).

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah paling aman sehingga pajak dapat menjadi sarana penting bagi berjalannya demokratisasi. Bila penguatan demokrasi lebih bersifat substantif, keterkaitan demokrasi dengan kebijakan perpajakan bisa ditelusuri, ditemukan, dan dipahami. Maka dari itu, penciptaan relasi antar aktor demokrasi negara akan berhasil diciptakan. *Sharing of authority* (pembagian wewenang/kekuasaan) antara negara dengan warganya dan *sharing of power* (pembagian kekuasaan) antara pusat dan daerah terlihat dalam kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan *resultante* (hasil) dan muara dari dua ranah penting dalam proses demokrasi, yaitu hubungan negara-masyarakat dan pusat-daerah, yang dapat ditunjukkan pada gambar 1.

Gambar 1
Pajak sebagai muara hubungan negara-rakyat dan hubungan pusat-daerah



Sumber: Edi Slamet Irianto (2009)

Penggunaan uang pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/Puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai meninggal dunia, menikmati

fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak (Diana Sari, 2013).

Penyediaan sarana dan prasarana publik yang kita manfaatkan hanya dapat tersedia karena peran pemerintah yang membutuhkan pengorbanan besar mengumpulkan dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran generasi mendatang sangat bergantung pada investasi generasi sekarang ini, yaitu semua sarana dan prasarana umum tersebut hanya dapat tersedia bila ada pajak.

Negara dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakatnya hanya melalui sumber pembiayaan dari pajak. Swasta tidak mungkin bisa melakukan apa yang dapat dilakukan oleh negara, karena konsep bisnis atau usaha yang dilakukan swasta hanya untuk kepentingan kelompok sendiri. Untuk itu, pembayaran pajak yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan tingkat kehidupan generasi mendatang. Dengan kata lain, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kesadaran memahami dan membayar pajak dengan benar.

Terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu:

- A. Penerimaan dari sektor Pajak
- B. Penerimaan dari sektor Migas (minyak dan gas bumi)
- C. Penerimaan dari sektor bukan Pajak

Dari ketiga sumber penerimaan tersebut, penerimaan sektor pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar negara (Wirawan Ilyas dan Richard Burton, 2010).

Menurut Aristanti Widyaningsih (2013), berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang dimaksud terdiri dari dua kelompok besar yaitu:

A. Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

B. Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kemandirian daerah untuk mencari dan menggali potensi yang ada di daerahnya menjadi usaha yang wajib dilakukan oleh setiap Kepala Daerah dan perangkatnya untuk dapat bertahan dan mengembangkan daerahnya menjadi lebih maju. Berdasarkan hal tersebut, setiap daerah di Indonesia berusaha memaksimalkan pajak daerah yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memenuhi segala keperluan yang ada di daerah. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung.

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak antara $107^{\circ}36'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}55'$ Lintang Selatan. Lokasi Kota Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, dan perekonomian. Hal tersebut dikarenakan Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan yaitu:

- A. Barat-Timur yang memudahkan hubungan dengan Ibukota negara
- B. Utara-Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang dan Pangalengan).

Secara topografi, Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 Meter diatas permukaan laut, titik tertinggi di daerah utara dengan ketinggian 1.050 meter dan terendah di sebelah selatan 675 meter diatas permukaan laut. Keadaan geologis dan tanah di Kota Bandung adalah hasil dari letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, di bagian selatan serta di bagian timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Suhu Kota Bandung tertinggi tercatat mencapai $30,4^{\circ}\text{C}$, dan terendah yaitu $18,2^{\circ}\text{C}$ (Bandung dalam angka 2013, 2013)

Kota Bandung sampai dengan saat ini menjadi salah satu kota di Indonesia yang mengusahakan secara maksimal pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Bahkan menurut (Kompas.com, 2010) yang dikutip oleh Rita Purnamasari (2013), Bandung menjadi tujuan wisata favorit di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan penghargaan yang diterima oleh Kota Bandung dalam ajang “*Indonesian Tourism Award*” sebagai kota tujuan wisata terfavorit tahun 2010.

Keindahan alam Kota Bandung dan sekitarnya menjadi potensi tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Kota Kembang ini. Berbagai macam objek wisata seperti kebun binatang, macam-macam taman dengan tema tertentu seperti taman fotografi, taman bunga, taman Pasupati, Museum Geologi, Museum Konferensi Asia Afrika, Saung angklung Ujo dan wisata alam seperti Tangkuban Perahu, pemandian air panas Ciater, dan berbagai objek wisata alam lain di sekitar Kota Bandung menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Selain itu, Bandung juga dikenal sebagai tujuan belanja bagi para wisatawan, diantaranya adalah berbagai *mall* di Kota Bandung dan adanya sarana hiburan “Trans Studio Bandung” semakin menambah keinginan para wisatawan datang dan menikmati segala fasilitas yang ada di Kota Bandung.

Berikut dijelaskan secara rinci mengenai Jumlah Wisatawan Kota Bandung selama delapan tahun (dari tahun 2005-2012) pada tabel I.

Tabel I
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kota Bandung
Tahun 2005-2012

TAHUN	WISATAWAN (orang)		
	MANCANEgara	DOMESTIK	JUMLAH
2005	91.350	1.837.500	1.928.850
2006	82.025	1.241.416	1.323.441
2007	137.268	2.420.105	2.557.373
2008	74.730	1.346.729	1.421.459
2009	168.712	2.928.157	3.096.869
2010	*	*	3.529.025
2011	194.062	3.882.010	4.076.072
2012	158.848	3.354.857	3.513.705

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Keterangan : Rincian Data untuk Tahun 2010 tidak tersedia

Pada tabel I terlihat jumlah wisatawan Kota Bandung tahun 2005-2012. Jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik berfruktusi setiap tahunnya. Tahun 2011 tercatat wisatawan Kota Bandung lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2008, jumlah wisatawan tercatat lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tidak diketahui secara pasti penyebab mengenai hal tersebut.

Sebagai konsekuensi dari adanya para wisatawan adalah berkembangnya sektor-sektor lain sebagai pendukung, diantaranya adalah dibidang kuliner dan akomodasi (hotel). Perkembangan pesat terjadi, secara khusus dalam pembangunan hotel. Banyak hotel dibangun sebagai sarana bagi para wisatawan untuk dapat menikmati keindahan alam kota Bandung dan sekitarnya. Adanya perkembangan dalam pembangunan hotel di Kota Bandung sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.

Tabel II
Peningkatan Jumlah Hotel Kota Bandung Tahun 2005-2012

Tahun	Jumlah Hotel	Peningkatan
2005	225	-
2006	232	7
2007	240	8
2008	252	12
2009	262	10
2010	267	5
2011	303	36
2012	340	37

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, diolah

Keterangan : Data Jumlah Hotel tidak termasuk losmen / rumah penginapan / pesanggrahan

Berdasarkan Tabel II, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun ada penambahan jumlah hotel di Kota Bandung. Penambahan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2012. Sebelumnya, tahun 2011 tercatat hotel di Kota Bandung sejumlah 303 buah. Pada tahun 2012 menjadi 340 buah, mengalami penambahan sebanyak 37 buah atau sebesar 12% dari tahun 2011.

Melihat kenyataan yang ada, secara global dapat diketahui bahwa pemerintah mendukung pembangunan hotel Kota Bandung dengan memberikan ijin untuk pendirian hotel di setiap tahunnya. Hal ini menjelaskan bahwa ada suatu keinginan dari pemerintah daerah Kota Bandung untuk dapat memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui pembangunan Hotel di Kota Bandung

Perkembangan wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara untuk datang berkunjung ke Kota Bandung dan melihat kenyataan yang ada selama delapan tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2012 mengenai adanya perkembangan signifikan dalam hal pembangunan hotel, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan pajak hotel kota Bandung. Kondisi tersebut memberikan

motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH HOTEL, TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah yang dapat diambil adalah:

- a. Apakah terdapat pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bandung?
- b. Apakah terdapat pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bandung?
- c. Apakah terdapat pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengacu pada identifikasi masalah, yaitu:

- a. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bandung.
- b. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bandung.
- c. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi:

a. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bandung mengenai penggunaan jasa hotel dan para pelaku bisnis hotel di Kota Bandung.

b. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi untuk mengembangkan strategi dan teori mengenai pajak hotel, serta sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perpajakan. Sehingga para akademisi dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk lebih memajukan bidang ilmu pengetahuan dan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

c. Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat berkontribusi positif dengan memberikan kemudahan perijinan pembangunan hotel di Kota Bandung.